

Vol. 2 No. 02, Desember 2013

ISSN: 2355. 1917

JURNAL

TAMADDUN

Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam

ISLAM DI ERA MODERN DAN PROBLEMATIKA YANG DIHADAPINYA
Yayat Suryatna

SISI LAIN DARI TIMUR LENK (Sang Penakluk Dunia)
AAH SYAFA'AH

KONSEP NEGARA MENURUT PEMIKIRAN
KONTEMPORER SAYYID QUTHB
ANWAR SANUSI

PENULISAN BIOGRAFI DALAM SEJARAH LOKAL
DUDUNG ABDURAHMAN

PERADABAN ISLAM DI SPANYOL DAN PENGARUHNYA
TERHADAP KEMAJUAN EROPA
MUNIR SUBARMAN

VERGADERING HAL ADAT CHERIBON 1915 PERUBAHAN TATANAN
ADAT MASYARAKAT DI KABUPATEN CIREBON MASA KOLONIAL
MUSTAQIM ASTEJA

TELAAH FILOLOGI DAN ARKEOLOGI DI SITUS PANJALU,
KAWALI, DAN PANGANDARAN
OPAN SAFARI

MENELUSURI PRILAKU PERADABAN GLOBAL
M. TATA TAUFIK

JIHAD DALAM SEJARAH ISLAM INDONESIA
KONTEMPORER (1945-2005)
H. SUMANTA dan SARIPAH

MEMBANGUN PASAR ISLAM DENGAN WAKAF ;
SEBUAH TINJAUAN HISTORIS DAN EKONOMIS
ZAENAL MASDUQI

Vol. 2 No. 02, Desember 2013

TAMADDUN

Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam

Tim Pengelola:
Penanggung Jawab
Yayat Suryatna

Redaktur
Jalaludin

Editor
Aah Syafa'ah

Sekretariat
Yayah Sa'diyah
Thamrin
Ahmad Ali Akbar Adikoro

Jurusan Sejarah Peradaban Islam
Fakultas Adab Dakwah Ushuluddin IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45232
(0231) 481264 Fax 489926.

Email: spi.tamaddun@gmail.com / spi.tamaddun@yahoo.com

Website: <http://web.iaincirebon.ac.id/spi/>

dicetak

CV. PANGGER Jl. Mayor Sastraatmdja no. 72 Gambirlaya Utara
Kasepuhan Cirebon Telp. 0231-223254
email : cirebonpublishing@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

SALAM REDAKSI —— iii

DAFTAR ISI — vii

ISLAM DI ERA MODERN DAN PROBLEMATIKA
YANG DIHADAPINYA ---129

Yayat Suryatna

SISI LAIN DARI TIMUR LENK (Sang Penakluk Dunia)—147
Aah Syafa'ah

KONSEP NEGARA MENURUT PEMIKIRAN KONTEMPORER
SAYYID QUTHB—163
Anwar Sanusi

PENULISAN BIOGRAFI DALAM SEJARAH LOKAL—177
Dudung Abdurahman

PERADABAN ISLAM DI SPANYOL DAN PENGARUHNYA
TERHADAP KEMAJUAN EROPA—193
Munir Subarman

VERGADERING HAL ADAT CHERIBON 1915
PERUBAHAN TATANAN ADAT MASYARAKAT
DI KABUPATEN CIREBON MASA KOLONIAL—211
Mustaqim Asteja

TELAAH FILOLOGI DAN ARKEOLOGI DI SITUS PANJALU,
KAWALI, DAN PANGANDARAN—229
Opan Safari

MENELUSURI PRILAKU PERADABAN GLOBAL —241
M. Tata Taufik

JIHAD DALAM SEJARAH ISLAM INDONESIA
KONTEMPORER (1945-2005)—255
H. Sumanta dan Saripah

KONSEP NEGARA MENURUT PEMIKIRAN KONTEMPORER SAYYID QUTHB

Anwar Sanusi

ABSTRAK

Penelusuran jejak-jejak para tokoh agama merupakan objek sejarah yang menarik dan penting dilakukan. Karena itu penelitiannya harus mendahulukan persektif sejarah, yang pengembangan penelitiannya lebih lanjut dilengkapi secara metodologis dengan perangkat konseptual dan teoretik yang bersifat interdisipliner. Disiplin ilmu-ilmu sosial dipandang tepat dan relevan untuk penelitian sejarah tertentu, seperti halnya biografi para tokoh agama di Jawa Barat. Pengarahan khusus kepada penelitian biografi tersebut, dapat dilakukan berdasarkan paradigma tentang "kontribusi aktor sejarah dalam menghadapi berbagai situasi yang terjadi pada kasus-kasus sejarah lokal". Karena itu jejak-jejak para tokoh agama di daerah penelitian dapat dimunculkan melalui penjelasan sejarah tentang perjuangan mereka sesuai situasi lingkungan dan zamannya, terutama dalam kurun waktu abad ke-20. Sejarah lokal Jawa Barat merupakan bingkai *spasial* dalam menganalisis peran-peran tokoh agama, dilengkapi dengan analisis problematik ataupun isu-isu yang menyertai perjuangan mereka dalam bingkai temporal abad ke-20 tersebut.

Kata Kunci : konsep negara, pemikiran, sayyid quthb

A. PENDAHULUAN

Sayyid Qutub merupakan salah satu *mufassir* kontemporer yang berusaha mensinergikan kekuatan penafsiran dan kebutuhan zaman atas pencerahan. Kecerdasan yang diimbangi oleh keteguhan iman membawa Sayyid Qutub pada ketajamannya menganalisa kondisi zamannya terutama masyarakatnya agar tak terbawa pada arus materialisme. Kajian tentang beliau semakin menarik ketika ke-anti-baratannya bukan karena Sayid Qutub tidak mengenali betul barat namun justru karena ia mengenyam pendidikan di berbagai universitas barat dan berkunjung ke berbagai belahan dunia Amerika maupun Eropa.¹

Pengalaman, pendidikan, serta lingkungan dimana karakter Sayyid

1 Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 183.

Qutub dibentuk sangat mempengaruhi pemikiran *radikalisme* kekananannya. Karya-karyanya terutama dalam bidang Tafsir sangat berpengaruh. *Tafsir fi Dzilal al-Qur'an* adalah kajian Tafsir yang belum tuntas dikaji oleh berbagai kalangan dan zaman. Karena ketajaman dan ketegasan penafsirannya dalam menjawab tantangan dan penjajahan Barat terutama pada masanya.²

B. BIOGRAFI SAYYID QUTHB

Nama lengkapnya adalah sayyid Quthb Ibrahim Husain Syadzili. Lahir pada tanggal 9 Oktober 1906 di desa Musya, dekat kota Asyru, Mesir atas. Quthb adalah seorang kritikus sastra, novelis, pujangga, pemikiran Islam dan aktivis Islam Mesir paling terkenal pada abad ke-20. Beliau adalah anak sulung dari lima bersaudara, dengan seorang saudara laki-laki dan tiga saudara perempuan. Meskipun keadaan keuangan keluarga Quthb sedang menurun pada saat dia lahir, keluarga ini tetap berwibawa berkat status ayahnya yang berpendidikan.³

Ayahnya bernama al-Hajj Quthb Ibrahim, seorang anggota *al-Hizb al-Wathani* (Partai Nasional), pimpinan Mushthafa Kamil, sekaligus pengelola majalah *al-Liwa'*, salah satu majalah yang berkembang pada saat itu. Quthb muda adalah seorang yang sangat pandai. Konon pada usianya yang relatif muda (dibawah umur 10 tahun), dia telah berhasil menghafal al-Qur'an di luar kepala.⁴

Pendidikan dasarnya dia peroleh dari sekolah pemerintah selain yang dia dapatkan dari sekolah *kuttub* (TPA). Pada tahun 1918, dia berhasil menamatkan pendidikan dasarnya. Pada tahun 1921 ia berangkat ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah. Kemudian, pindah ke Halwan bersama pamannya, Ahmad Husain Utsman yang merupakan seorang jurnalis. Pada tahun 1925, ia masuk ke institusi diklat keguruan, dan lulus tiga tahun kemudian. Lalu ia melanjutkan jenjang perguruannya di Universitas *Dar al-Ulum* hingga memperoleh gelar sarjana (Lc) dalam bidang sastra dan diploma pendidikan. Ia diangkat sebagai penilik Kementrian Pendidikan dan Pengajaran Mesir sampai menjabat inspektur.⁵

2 Ibid, hlm. 184.

3 John L. Esposito. *Ensiklopedi Islam Modern*, jilid. 5. (Bandung : Mizan : 2001), hlm. 121.

4 Ibid, hlm. 141.

5 Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir al-Qur'an*, Loc. Cit., hlm. 189.

Sayyid Qutb bekerja dalam Kementrian tersebut hanya beberapa tahun. Ia kemudian mengundurkan diri setelah melihat adanya ketidakcocokan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah dalam bidang pendidikan karena terlalu tunduk terhadap pemerintah Inggris. Pada waktu bekerja dalam pendidikan tersebut, beliau mendapatkan kesempatan belajar ke Amerika Serikat untuk kuliah di *Wilson's Teacher College* dan *Stanford University* dan berhasil memperoleh gelar M.A dibidang pendidikan. Beliau tinggal di Amerika selama dua setengah tahun.⁶

Sayyid Quthb adalah pemikir radikal sekaligus aktifis yang militan dalam gerakan Islam modern kontemporer. Pemikirannya telah mempengaruhi para aktifis Islam di berbagai dunia Islam lainnya. Aktivitas dan pemikirannya telah membawa *Ikhwan al-Muslimin* ke dalam kancah gerakan yang diperhitungkan oleh rezim Mesir dan berdirinya cabang-cabang *Ikhwan* di berbagai Negara.⁷

Militansi dan idealisme Sayyid Quthb aktif dalam gerakan *Ikhwanul Muslimin* sampai tahun 1945, yakni *Ikhwan* berlawanan dengan revolusi pemerintah. Ia dan kelompoknya ditangkap dengan tuduhan akan membunuh AbdNasher. Mereka kemudian disiksa dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Pada tahun 1964 Abdus Salam Arif, pemimpin Irak berupaya mendesak Abd Nasher agar membebaskan sayyid. Namun tak lama setelah keluar penjara, Sayyid di dakwa dengan tuduhan lain yakni tuduhan melakukan *konspirasi* atau *kudeta* penggulingan kekuasaan pemerintah Mesir.⁸ Pada tahun 1965, Sayyid Qutb divonis hukuman mati. Sebelum dilakukan *eksekusi* Gamal Abd Nasher pernah meminta Sayyid Qutb untuk meminta ma'af atas tindakannya yang hendak dilakukannya, namun permintaan tersebut ditolak oleh Sayyid Quthb.⁹

C. KARYA-KARYA SAYYID QUTHB

Karya-karya beliau selain beredar di Negara-negara Islam, juga beredar

6 Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasssir al-Qur'an*, Loc. Cit., hlm. 183.

7 Didin saefuddin. *Pemikiran Modeern dan Post Modern Islam*, Jakarta: PT. Grasindo , Anggota Ikapi 2003), hlm. 111-112.

8 Shalah Abdul Fatah al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Penj: Salafuddin Abu Sayyid, (Surakarta : era Intermedia : 2001), hlm. 31-34.

9 Didin saefuddin. *Pemikiran Modeern dan PostModern Islam*, Op. Cit., hlm. 111.

di kawasan Eropa, Afrika, Asia dan Amerika. Dimana terdapat pengikut-pengikut *Ikhwan al-Muslimin*, hampir dipastikan disana ada buku-buku Quthb, karena beliau adalah tokoh *Ikhwan* terkemuka. Diantara karya-karyanya adalah: *Muhimmat al-Sya'ir fil Hayyawa Syi'ir Jail al-Hadir* 1933, *Naqd Mustaqbal ats-Tsaqafah fi Mishr* 1939, *at-Tashwir al-Fanni fi al-Quran* 1945, *Masyahid al-Qiyamah fi al-Quran*, *Fi Zhilal al-Qur'an* 1953, *Ma'alim fith-Thariq*, *Asywak* 1947, 'al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam dan *Ma'rakah al-Islam wa ar-Ra's al-Maliyyah*, *as-salam al-Islami wa al-Islam* 1951, *Hadza ad-Din*, *al-Mustaqbal li Hadza ad-Din*, *Khasais at-Tasawwur al-Islami qa Muqawwimatihi Islam wa Musykilah al-Hadarah*,¹⁰ *Kutub wa Shakhshiyat*, *al-Adalah al-Ijtima 'iyyah fi'l Islam*, *Tifl min al-Qaryah*, dan *Masyahid al-Qiyamah fi al-Qur'an*.

1. Konsep Negara menurut Sayyid Quthb
2. Konsep Pemerintahan Supra Nasional
3. Hanya ada satu bentuk Negara yang bisa menopang pemerintahan Islami, yaitu negara Islam (*Dar al-Islam*). Negara Islam diperuntukkan bagi orang yang mau menerima syariat Islam sebagai tatanan, meski ia bukan seorang muslim. Islam tidak didasarkan pada hubungan tanah kelahiran, kesukuan, keturunan, pernikahan, kabilah ataupun kerabat. Islam tidak akan tegak jika tidak dikendalikan oleh Islam dan syariatnya.¹¹
4. Hanya ada dua alternatif: Islam atau Jahiliyah. Tidak ada pilihan lain, "setengah Islam, setengah jahiliyah". Islam memiliki kepribadian, konsepsi, dan aturan main. Islam akan mewujudkan semua cita-cita kemanusiaan dan aturan mainnya. Keterpurukan yang selama ini dialami umat manusia tidak akan terobati hanya dengan reformasi kecil-kecilan dalam beberapa bagian kecil dari berbagai sistem dan aturan main.¹²

Sayyid Quthb memiliki suatu konsep tentang pemerintahan yang ideal dalam Islam. Menurutnya, pemerintahan yang paling bagus adalah pemerintahan Supra Nasional. Dalam sistem ini, wilayah Negara meliputi

10 Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi dan kejernian pemikirannya*. (Jakarta: Gema Insani 2005), hlm. 21-24.

11 Black Antony, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*. (Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta : 2006), hlm. 121.

12 Quthb, Sayyid. *Keadilan Sosial Dalam Islam Sjadzali, H. Munawir. Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia : 2003), hlm. 321..

seluruh dunia Islam dengan sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat. Yang dikelola atas prinsip persamaan penuh antara semua umat Islam yang terdapat di seluruh penjuru dunia Islam, tanpa adanya *fanatisme ras* dan kedaerahan. Tentang pemanfaatan potensi pendapatan yang dimiliki oleh daerah, diutamakan untuk kepentingan daerah itu sendiri, dan apabila masih ada lebihnya, maka akan disetorkan ke *bait al-mal* atau bendahara pemerintah pusat sebagai milik bersama yang akan dipergunakan untuk kepentingan bersama.¹³

Persamaan hak antara para pemeluk berbagai agama. Dalam hal ini negara Islam akan menjamin penuh hak-hak *dzimmi* dan *musyrikin* yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, hak-hak mereka akan ditegakkan atas dasar kemanusiaan, tanpa membedakan pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain pada persoalan kebutuhan manusia. Negara Islam memberikan jaminan persamaan mutlak kepada masyarakat, dan merealisasikan kemanusiaan dalam peribadatan dan sistem kemasyarakatan.¹⁴

D. RADIKALISME: PEMERINTAHAN TANPA SYARIAT ISLAM ADALAH JAHILIYAH

Substansi akidah yang menjadi pokok pembicaraan Quthb adalah pengabdian total (ibadah), kepada Allah. Bahwa manusia harus mengetahui tuhan mereka yang benar, kemudian menyerahkan diri secara total semata-mata kepada-Nya, dan mengeliminasi semua "ketuhanan" manusia. Allah bukan semata-mata penguasa alam semesta tetapi juga pemilik kedaulatan; sehingga pengakuan "tiada tuhan selain Allah" bermakna bahwa hanya Allah sajalah penguasa sesungguhnya, hanya Allah pemegang kedaulatan dan mempraktikkan hukum-hukum-Nya.¹⁵

Hilangnya makna-makna ini dalam kehidupan merupakan *indikasi jahiliyah*, dalam pandangan Qutb. *Kejahiliyahan* pada prinsipnya berporos "penuhanan" atau penyembahan kepada selain Allah untuk menentukan

13 Effendy, Bahtiar, *Teologi Baru Politik Islam. Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*. (Jakarta : Galang Press : 2001), hlm. 221.

14 Roy, Oliver, *The Failure of Political Islam*, Harvard 1996, telah diterjemahkan, *Gagalnya Politik Islam*, (Aceh : Serambi : 2002), hlm. 312.

15 Qutb, Sayyid, *Petunjuk Jalan. Maalim Fi at-Thariiq*. (Jakarta : Gema Insani Press : 2001), hlm. 131...

konsepsi dan nilai, peraturan dan perundangan, sistem dan solusi. Praktisnya dalam pemahaman tentang penyembahan kepada manusia mencakup sisi-sisi penerimaan konsepsi ideologi sampai bentuk pemerintahan sekuler yang menentang syari'ah. Atau secara teologis, penekanan Quthb adalah pada sisi *hakimiyah* dari *uluhiyah* Allah SWT.¹⁶

Pada penilainnya masyarakat *jahiliyah* di era modern ini mencakup hampir seluruh dunia, baik di Barat atau Timur, bahkan termasuk masyarakat muslim kontemporer. Parameter utama *indikasi kejahiliyahan* itu adalah tidak adanya praktek penegakkan kedaulatan Allah di dalam kehidupan mereka. Bagi Quthb, antara Islam dan *jahiliyah* adalah oposisi *biner* yang tidak dapat dipersatukan. Kalau tidak Islam pasti *jahiliyah*. Jika *jahiliyah* maka tidak Islam.¹⁷

Kemunculan kelompok *imani* merupakan basis pembangunan masyarakat Islam, sebuah masyarakat yang berbeda secara total dengan masyarakat *jahiliyah*. Metodologi penegakan masyarakat Islam (melalui kelompok *pionir* itu) haruslah metodologi yang Islami. Metode itu sudah ada di dalam Islam. Dengan demikian Islam tidak sekedar ajaran atau *risalah* tetapi juga adalah metode (*manhaj*) untuk menegakkan *risalah* itu. Dalam pertumbuhannya masyarakat Islam akan selalu berkonfrontasi dengan masyarakat *jahiliyah*. Konfrontasi antara *jahiliyah* dan Islam tidak hanya berlangsung dalam konfrontasi pemikiran maupun moral, tetapi berlangsung pula secara praksis. Metode yang digunakan *jahiliyah* dalam menyerang Islam tidak semata serangan dalam bentuk pemikiran tetapi juga (dan ini utamanya) dalam bentuk praksis penggunaan kekuatan. Sehingga dalam menghadapi *jahiliyah* ini, Islam menghadapinya juga tidak semata-mata menggunakan *persuasi* pemikiran tetapi juga menggunakan metode yang praksis. Dalam proses konfrontasi ini jihad merupakan metode yang merefleksikan karakter praksis dari metode (*manhaj*) Islam.¹⁸

Dalam refleksinya terhadap bertahapnya *legislasi* perintah *jihad* hingga mencapai puncak pada fase *ofensif*, Quthb menyebutkan beberapa karakter utama. Pertama adalah ini adalah metode praktis, *realis*. *Jahiliyah* membentuk

16 A.I: Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara. Prespektif Modernis & Fundamentalism Indonesia* (Surabaya : Terra : 2001), hlm. 133.

17 Sayyid Quthb, *al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*, hlm. 124-125.

18 Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*, hlm. 110.

dirinya dalam bentuk yang praktis. Sehingga langkah menghadapinya juga mesti praktis. Kedua, problem yang dihadapi masyarakat dalam proses pertumbuhannya ini berlangsung secara bertahap. Oleh karenanya metode pemecahan masalah tidak dalam bentuk teoritis tetapi berangsur-angsur sesuai kebutuhan praktisnya.¹⁹

Ketiga, agama ini membutuhkan metode yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental dan tujuannya. Keempat, basis legal bagi interaksi antara komunitas muslim dengan yang lain. Pada puncaknya proses *Jihad* adalah *ofensif* . Mekanisme pembelaan diri yang diberikan oleh sebagian tokoh yang menyatakan *Jihad* pada dasarnya adalah proses *defensif* , dinilai Quthb sebagai cara *inferior* (kalah mental) semata-mata.²⁰

E. KRITIK TERHADAP PEMIKIRAN SAYYID QUTHB

Pemikiran Sayyid Quthb dianggap radikal karena Mesir, di bawah pemerintahan Gamal Abd Naser. Selain itu, pemikiran Sayyid Quthb dipengaruhi al-Maududi, Quthb tidak pernah menikah, hidup dipenjara dan menulis di penjara, sehingga tulisan-tulisan Quthb lebih radikal, karena menulis dalam kondisi yang tertekan oleh penguasa.²¹

Konsep *hakimiyah* dipengaruhi oleh pemikiran al-Maududi. Konsep *jahiliyah* dielaborasi secara lebih radikal dari pemikiran Abul Hasan an-Nadwi dan al-Maududi. Sayyid Quthb sendiri memberikan apresiasinya terhadap pemikiran an-Nadwi dalam kata pengantar buku an-Nadwi, *Kerugian Dunia Karena Kemunduran Umat Islam* . Apresiasi terhadap an-Nadwi juga terdapat dalam kutipan-kutipan dari an-Nadwi yang tersebar dalam buku-buku Sayyid Quthb.²²

Pengaruh besar al-Maududi dapat dilacak dalam kutipan panjang Quthb terhadap *risalah Jihad* al-Maududi ketika Quthb menafsirkan surat *al-Anfal* dalam *Zhilal* . Buku-buku al-Maududi yang lain, yakni *Prinsip-prinsip Islam, Islam dan Jahiliyyah, Empat Terminologi al-Qur'an* seringkali dirujuk oleh

19 Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara* , hlm. 20..

20 Sayyid Quthb, *al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam* , ke-16, hlm. 78.

21 TIM ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewarga Negara Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Renada Media, 2003), hlm. 110-111..

22 Mashkuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 73-74..

Sayyid Quthb dalam karya-karyanya. Pemikiran-pemikiran Quthb banyak yang bersifat *utopis*, dan idealis, sementara Quthb sendiri ada yang belum sepenuhnya mempraktekkan bagaimana teori yang sempurna itu dibangun, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan bernegara.²³

Sayyid Quthb dalam pemikirannya bersifat *utopis*, seperti kedaulatan ditangan Tuhan bukan ditangan Rakyat, teorinya sudah bagus, namun itu perlu lagi untuk diinterpretasikan dalam praktek-praktek yang lebih kongkrit, makanya pemikiran Sayyid Quthb kadangkala tidak kongkrit, karena Quthb sendiri relatif banyak hasil pemikirannya yang belum dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Quthb yang menolak demokrasi tapi menerima musyawarah, sebab bagi Quthb kedaulatan itu berada ditangan Tuhan, sementara demokrasi berada dalam tangan rakyat. Teori ini tentu lebih matang dari konsep dan teori yang sudah dimatangkan, kemudian ketika diterapkan dalam dunia nyata yang lebih kongkrit ketemu, seperti voting dan *trias politica*, adalah hasil perenungan dan pemikiran yang sudah lama artinya tidak muncul tiba-tiba saja, dan mampu diintegrasikan dalam kondisi nyata dari teori kemudian dipraktekkan dalam kondisi nyata.²⁴

Pemikiran Quthb tentang kedaulatan berada di tangan Tuhan, tidak begitu sebenarnya perlu untuk diimplementasikan dalam praktek yang sesungguhnya dan butuh terjemahan.²⁵ Berbeda dengan Fazlur Rahman yang sangat jelas, ketika berfikir Negara Islam. Fazlur Rahman berani dan bertanggung jawab yang mengatakan bahwa Islam tidak memerintahkan dan juga tidak mengajarkan secara jelas mengenai mengenai sistem ketatanegaraan tetapi mengakui pendapatnya sejumlah tata nilai dan etika dalam al-Qur'an. Kendatipun Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan bahwa dirinya sebagai pemimpin Negara sebagai sebuah alat bagi Negara Islam untuk menyebarkan dan mengembangkan Islam. Namun posisi Fazlur Rahman dengan tegas mengatakan bahwa "antara agama dan politik tidak

23 George Sorensen, *Democracy and Democratization, Processes and Prospects in a Changing World* (San Fransisco: Westview, 1993), hlm. 3.

24 Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gema Media, 1999), hlm. 8.

25 David A. Apter, *Introduction to Political Analysis* (Cambridge and Massachusetts: Winthrop Publisher, Inc, 1977), hlm.75-89

dapat dipisahkan".²⁶

Lebih lanjut, pemikiran Fazlur Rahman tentang konsep Negara Islam, ia mengatakan bahwa Islam memerintahkan bahwa persoalan-persoalan kaum muslimin ditangulangi melalui *syura* atau konsultasi timbal balik. Selama ini saya mengetahui bahwa *syura* merupakan salah satu perintah Tuhan kepada orang muslim untuk menyelesaikan persoalan umat yang terdapat dalam banyak ayat di dalam al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Muhammad. Nilai etika dalam prinsip *syura* ini telah dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan Negara oleh Fazlur Rahman.²⁷

Pemikiran Fazlur Rahman yang mengatakan bahwa kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan kritik konstruktif yang ditujukan kepada pemerintah dianggap sebagai tugas agama. Praktek ini yang menurut saya konkrit dijalankan oleh Sayyid Quthb yang waktu itu selalu mengkritik penguasa yaitu Gamal Abd Naser di Mesir, ketika pemikirannya yang terlalu radikal yang bisa mengancam kedaulatan Negara, maka dipenjarakan oleh rezim berkuasa saat itu, ketika Quthb disuruh untuk menarik pemikirannya yang radikal, namun Quthb tidak mau menarik pemikirannya, sehingga Quthb akhirnya meninggal di tiang gantungan.²⁸

Kewajiban untuk mendirikan Negara Islam tidak ada perintah dalam al-Qur'an, sehingga punya pandangan yang berbeda dengan Quthb yang bagi Quthb Negara Islam harus ada yang teraktualisasi dalam bentuk-simbol-simbol Negara Islam. Karena sampai sekarang saya belum menemukan Negara yang benar dan berani mengatakan bahwa negaranya adalah Negara Islam, Makkah sendiri menurut saya tidak bisa dikatakan sebagai Negara Islam, karena banyak terjadi disana pelanggaran HAM dan ketidak-adilan, prinsip Negara Islam hal di atas adalah persoalan yang substansial.²⁹

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ahmad Syafi'i Maarif dalam bukunya

26 Sebagaimana dikutip oleh Mashkuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna, Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 71-72.

27 John L. Esposito, *Islam dan Demokrasi: Warisan Sejarah dan Konteks Global*, dalam Bernard Lewis et. al, *Islam Liberalisme Demokrasi* (Jakarta: Paramadina, 2002), Cet. ke-1, hlm. 355.

28 Koentjoro Poerbopranoto, *Sistim Pemerintahan*, hlm. 11.

29 A. Ubaedillah, dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, hlm. 162.

Islam dan Masalah Kenegaraan bahwa al-Qur'an tidak pernah menyebutkan Negara Islam, dan sampai pada sebuah kesimpulan, tidak ada Negara Islam. Namun tetap ada cita-cita ada Negara yang mempraktekkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Negara Islam.

Radikalisme pemikiran Quthb adalah pengaruh yang dominan bukan pada al-Maududi, tapi bagaimana ia hidup di Mesir di bawah *rezim* yang otoriter, tidak memberikan Quthb berfikir dan bebas, sehingga keinginan Quthb untuk menegakkan syariat Islam ketika itu karena Quthb merasakan betul ketika penguasanya membungkam aktifitas dan pemikiran untuk mendirikan negara Islam. Pemikiran Quthb, bagaimana revolusi untuk mengembalikan kedaulatan Tuhan, inilah yang kemudian juga menginspirasi Quthb yang mengatakan menjalankan pemerintahan Negara tanpa syariat Islam sama dengan *jahiliyah*, pemikiran yang sangat radikal sekali, sehingga Quthb digantung karena melawan penguasa Gamal Abd Naser yang *jahiliyah* karena memerintah tidak berdasarkan pada kedaulatan Tuhan.³⁰

Apakah Sayyid Quthb menyadari implikasi pemikiran yang digagasnya. Fenomena radikalisme keagamaan, kekerasan, maupun teror yang terjadi di dunia Islam sekarang ini dipandang oleh banyak pakar memiliki latar pemikiran sebagaimana yang difahami oleh Quthb, pada sebagian kasusnya. Yang perlu dipahami adalah bahwa sebuah pemikiran ketika muncul dalam masyarakat, terdistribusi dalam jaringan sosialnya memiliki implikasi atau efek sosial yang tidak selalu sesuai dengan *intensitas*, keinginan atau harapan pemikirnya.³¹

Di satu sisi kita tidak dapat menyerahkan semua tanggung jawab fenomena yang muncul sekarang ini kepada Quthb sebagai pemikir yang dirujuk sebagai referensi ideologis banyak radikalisme, bahkan oleh John L. Esposito disebut sebagai *godfather radikalisme Islam*. Pada sisi lain kita perlu memahami konteks sosial politik yang melahirkan ideologi radikalisme itu. Yusuf Qardawi dalam *Prioritas Gerakan Islam* menyatakan bahwa larisnya ide yang menuduh *fasik*, *takfir* dan yang semacamnya dibantu oleh suasana mencekam yang dialami gerakan Islam dimana para da'inya terancam tiang

30 Black Antony,. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*. Op. cit., hlm. 121.

31 Quthb, Sayyid. *Keadilan Sosial Dalam Islam* Sjadzali, H. Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Op. cit., hlm. 124.

gantungan, penjara dan penindasan, sementara pintu pihak yang sekularis, sosialis, komunis yang memusuhi Islam terbuka lebar. Pada situasi seperti inilah pemikiran Quthb mendapatkan momentumnya, dipengaruhi dan mempengaruhi situasi yang ada.³²

Pemikiran Sayyid Quthb yang sangat radikal dan fundamental adalah seperti lenin, mendukung gerakan bawah tanah bersenjata: *Signposts inspirasi teoritis* bagi kelompok Islam yang siap menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka di Timur Tengah. Alat yang digunakan dalam perjuangan tergantung pada keadaan, dan bagaimana musuh *jahiliyah* bertindak, taktik utama adalah dakwah; baru ketika sudah beralih ke ajaran Islam yang benar, negara Islam dapat didirikan. Selama kebebasan berbicara tidak terancam, metode damai harus tetap harus digunakan. Baru ketika umat dikekang, *jihad* fisik meski dilakukan.³³

Semua masyarakat Islam, hanya dapat dibangun menurut ajaran-ajaran syariat. Hanya syariatlah yang mampu menjamin kemerdekaan dan keadilan bagi semua orang beriman. Bagi Quthb selama terdapat orang atau kelompok yang membuat perundangan bagi orang lain, persamaan mutlak dan martabat tidak dapat dilaksanakan. Syariat bagi pandangan Quthb tidak terlepas dari perintah-perintah, hukum-hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan. Syariat Tuhan berarti segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan Manusia. Syariat mencakup pokok-pokok moralitas iman, pokok-pokok pengelolaan keadilan, pokok-pokok moralitas dan perilaku manusia maupun pokok-pokok pengetahuan. Syariat juga menyangkut tentang semua aspek sosial, ekonomi, politik, etika, intelektual maupun estetika kehidupan.³⁴

Quthb tidak mengemukakan pokok-pokok tentang pemikirannya bentuk Negara Islam. Ia hanya menekankan bahwa Negara Islam itu harus demokratis berdasarkan pada prinsip *syura* (musyawarah) seperti yang digambarkan al-Qur'an:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِيَتَّعِبُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ

32 Effendy, Bahtiar, *Teologi Baru Politik Islam. Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi. Op. cit.*, hlm. 152..

33 Roy, Oliver, *The Failure of Political Islam*, Harvard 1996, telah diterjemahkan, *Gagalnya Politik Islam, Op. cit.*, hlm. 144.

34 Sayyid Quthb, *al-'Adālah al-Ijtimā'iyah fī al-Islām, Op. cit.*, hlm. 124-125.

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka .Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar ,tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu .Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka ,dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu³⁵. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.³⁶

Tetapi karena syariat tidak menetapkan suatu cara tertentu, apakah hal itu tergantung pada pendapat kaum muslim seluruhnya, atau pemimpin yang menguasai soal-soal Negara, maka cara pengambilan konsensus diserahkan kepada umat Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu Negara Islam berprinsip bahwa Negara Islam harus berperan dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, ini tidak boleh dilanggar.³⁷

Menurut Sayyid Quthb pemerintah demokrasi pada hakikatnya adalah pemegang amanat rakyat untuk menjalankan syariah. Pemimpin dipilih oleh rakyat yang paham Islam dengan cara *voting*. Meskipun seperti demokrasi Sayyid Quthb tidak setuju dengan demokrasi sepenuhnya. Demokrasi harus tertetap berada di bawah tuntunan syariat. Pemikiran Sayyid Quthb, ada persamaannya dengan al-Maududi dalam hal *hakimiyah*, yaitu teori kedaulatan, ia berpendapat bahwa kedaulatan sepenuhnya milik Tuhan, oleh karena itu perhambaan total manusia harus kepada Tuhan semata. Kaum muslimin harus bertindak dan bekerja di dalam batas-batas wahyu al-Qur'an seperti diajarkan oleh Nabi Muhammad, yang peranannya sebagai pemandu perhambaan manusia kepada Tuhan.³⁸

35 Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

36 Al-Qur'an Surat Ali Imron Ayat 159.

37 Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*, Op. cit., hlm. 110.

38 Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Op. cit., hlm. 20.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mashkuri. *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1999.
- A. Apter, David. *Introduction to Political Analysis*. Cambridge and Massachusetts: Winthrop Publisher Inc. 1977.
- Al-Khalidi, Shalah Abdul Fatah. *Pengantar Memahami Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*. Penj: Salafuddin Abu Sayyid. Surakarta: Era Intermedia. 2001. A.I, Kamaruzzaman, dalam bukunya, *Relasi Islam dan Negara. Perspektif Modernis & Fundamental*. Indonesia Terra. 2001.
- Antony, Black. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. 2006.
- Ar-Rumi, Fahd bin Abdurrahman. *Ulumul Qur'an*. Penj: Amirul Hasan M. Halabi. Yogyakarta: Titian Olahi Pres. 1996.
- Effendy, Bahtiar. *Teologi Baru Politik Islam Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*. Galang Press. 2001.
- Esposito, John L. *Ansiklopedi Islam Modern*, jilid 5. Bandung: Mizan. 2001.
- , *Islam dan Demokrasi: Warisan Sejarah dan Konteks Global*. Dalam Bernard Lewis; et.all. *Islam Liberalisme Demokrasi*. Jakarta: Paramadina. 2002.
- Fahullah, Mahdi. *Titik Temu Agama dan Politik-Analisis Pemikiran Sayyid Qutb dalam Sayyid Qutb*. al-Athfuyul Arba'ah. Jakarta: Ramandhani. 1991.
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufassir al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2008.
- Hidayat, Nuim. *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani. 2005.
- Mahfud MD, Moh. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gema Media. 1999.

- Roy, Oliver. *The Failure of Political Islam*. Harvard.1996, Terj: *Gagalnya Politik Islam*. Serambi. 2002.
- Saefuddin, Didin. *Pemikiran Modern dan Post-Modern Islam*. Jakarta: PT Grasindo (Anggota Ikapi). 2003.
- Qardhawi, Yusuf. *Ijtihad Kontemporer*. Penj: Abu Barzani. Surabaya: Risalah Gusti. 1995.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Dzilal al-Qur'an (Di bawah Naungan al-Qur'an*. Jilid 1. Jakarta: Gema Insani Press. 2000.
- . *Ma'alim fi al-Tariq*. Beirut : Dar al-Shuruq. T.T.
- *Keadilan Sosial Dalam Islam*. Sjadzali, H. Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2003.
- . *Petunjuk Jalan. Ma'alim fi at-Tharii*q. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Sorensen, George. *Democracy and Democratization, Processes and Prospects in a Changing World*. San Fransisco: Westview. 1993.
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Pendidikan Kewarga Negara Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Renada Media. 2003.